

# **PENGARUH TRANSPARANSI, PARTISIPASI MASYARAKAT, LATAR BELAKANG PENDIDIKAN TERHADAP KUALITAS PENYUSUNAN APBD**

**(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman)**

**Friska Hardiantika<sup>1</sup>**

Progam Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta

Email: friskahardiantika@gmail.com

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the influence of transparency, community participation, educational background on the quality of preparation regional budget. This test uses preparation of the regional budget as the dependent variable, transparency, community participation, educational background as an independent variable. the sample used was a individual of Regional Government Organization in Sleman Regency. This research uses purposive sampling method. The type of data used in this study is primary data. Based on the questionnaire distribution process, 107 respondents were obtained. Hypothesis testing in this study using multiple regression using software applications SPSS v.15. The resul of this study shows that variables of transparency and educational background had a positive and significant effect on the quality of preparation regional budget, but the community participation variable did not effect the quality of preparation regional budget*

**Keywords:** *quality of preparation regional budget (APBD), transparency, community participation, educational background.*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara republik yang terdiri dari berbagai wilayah, provinsi, kabupaten, maupun kota. Indonesia mengalami perkembangan sistem tata kelola pemerintahan sektor publik secara pesat dalam beberapa kurun waktu terakhir, yang ditandai dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dampak bagi pemerintah

daerah dengan adanya era baru otonomi daerah yaitu terdapat pelimpahan wewenang secara luas dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Indikasi keberhasilan otonomi daerah yaitu adanya peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat, demokrasi yang semakin maju, serta adanya hubungan antara daerah dan pusat

serta antar daerah (Lestari dan Rakhmawati, 2017). Anggaran sektor publik merupakan instrumen atau alat akuntabilitas yang digunakan untuk membiayai program-program dengan dana uang publik. Perencanaan, pengelolaan, dan penganggaran daerah termasuk bagian dalam pemerintahan yang harus disusun, diatur serta direncanakan yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah. Bentuk dari proses perencanaan, pengelolaan, serta penganggaran daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD atau yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana operasional keuangan pemerintah daerah dimana salah satu pihak menggambarkan anggaran perkiraan biaya yang akan dikeluarkan dalam kegiatan atau proyek selama 1 (satu) tahun anggaran. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pendapatan daerah. (Lestari dan Rakhmawati, 2017). APBD kabupaten/

kota memperoleh anggaran/dana dari bagian dana perimbangan dari keuangan pusat dan daerah yang dana tersebut diterima oleh kabupaten/kota baru setelah itu dana tersebut di berikan ke desa-desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Fenomena yang melanda di Indonesia dalam penetapan APBD dari tahun 2011 – 2014 terhadap indikator dalam hal ketepatan waktu masih rendah. Perubahan penetapan dalam APBD yang terjadi dalam tahun 2015, yang dimana UU No. 23 tahun 2014 berisi Pemerintah daerah yang mengatur sanksi kepada pihak yang langsung terlibat dalam proses penetapan APBD, dengan adanya sanksi tersebut menjadi pendorong dalam menetapkan APBD tepat waktu (Laksono, 2017), tetapi pada kenyataannya terdapat pemerintahan daerah yang masih mengalami keterlambatan penyusunan APBD. Dampak dari keterlambatan dalam penyusunan APBD sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah, salah satu dampak yang akan timbul adalah menjadi

terlambatnya pelaksanaan program yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah yang pendanaannya sebagian besar berasal dari APBD, Seharusnya penyusunan APBD disusun, disetujui, dan ditetapkan dengan tepat waktu sebelum akhir periode atau tanggal 31 Desember (Mutmainah dan Suryono, 2015).

Menurut penelitian dari Panggabean dan Dame (2018) APBD memiliki beberapa unsur antara lain:

1. Rencana kegiatan yang diuraikan secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target untuk menutupi pengeluaran biaya-biaya aktivitas.
3. Jenis kegiatan dan proyek.
4. Priode anggaran (biasanya dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran)

Menurut Pemandagri Nomor 52 Tahun 2015 penyusunan APBD tahun anggaran 2016 didasarkan pada prinsip: sesuai dengan kebutuhan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tertib, tepat waktu, partisipatif,

transparansi, dan yang tidak bertolak belakang terhadap kepentingan umum. Namun pada kenyataannya masih terdapat hambatan atau halangan yang membuat proses penyusunan APBD ini belum sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang serta prinsip penyusunan APBD.

Seperti penelitian dari Lestari dan Rakhmawati (2017) yang dilakukan Studi kasus di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 tentang penyusunan APBD, dari penelitian tersebut dalam penyusunan APBD di Pemerintah Provinsi Riau masih belum sesuai dengan Pemandagri Nomor 52 Tahun 2015, karena masih adanya kepentingan-kepentingan lain yang menghambat penyusunan APBD tersebut dan kurangnya transparansi atau keterbukaan dalam penyusunan APBD. Kepentingan itu adalah seperti kepentingan pribadi ataupun golongan.

Dari studi diatas terbukti bahwa dalam penyusunan APBD haruslah sesuai dengan Pemandagri Nomor 52 Tahun

2015, maka laporan yang dihasilkan akan sesuai dengan prinsip-prinsip APBD yang tertib, tepat waktu, transparansi, partisipatif, dan tidak bertentangan atau bertolak belakang dengan kepentingan umum.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Lestari dan Rakhmawati (2017) dan Mutmainah dan Suryono (2015) perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi, waktu, populasi dan mengubah variabel penyusunan APBD sebagai variabel dependen. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sleman.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Stewardship**

Teori stewardship merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para petinggi dalam perusahaan yang tidak termotivasi oleh tujuan individu dan bertindak sesuai dengan cara yang dimiliki. Sasaran utama dalam Teori

stewardship ini adalah lebih ditunjukkan pada kepentingan organisasi, sehingga teori ini memiliki dasar sosiologi dan psikologi dimana para petinggi sebagai *stewards* termotivasi untuk bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan principal, dan perilaku *stewards* tidak akan meninggalkan organisasinya sebelum sasaran dari organisasi tersebut mencapai sasaran. Proporsi orang yang mempunyai motivasi setelah perintah dari atasan dan faktor intrinsik lebih cocok menjadi *stewards* dalam hubungan *principal stewards* jika dibandingkan dengan orang yang tidak termotivasi oleh perintah dari atasan dan faktor ekstrinsik (Donaldson dan Davis, 1991).

Teori stewardship ini didesain untuk menguji petinggi dalam organisasi sebagai pelayan yang dapat bertindak secara baik kepada principalnya. Dalam sektor publik pelaku steward yaitu kepala OPD atau yang disebut juga dengan kepala daerah, sedangkan pelaku principal yaitu

masyarakat yang dalam artian dapat diwakilkan oleh DPRD (Murtin, 2015).

### **Transparansi**

Transparansi ialah prinsip yang menjamin kebebasan, keterbukaan kepada setiap orang secara jujur dengan dasar bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengetahui hal apapun secara terbuka dan menyeluruh atas penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Coryanata (2012) transparansi merupakan prinsip dari *good governance* dan dibangun diatas dasar informasi yang bebas.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lestari dan Rakhmawati (2017), Zaini dan Ningsih (2018), Panggabean dan Dame, (2018) dan Fecky M, dkk (2018) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyusunan APBD.

**H<sub>1</sub>: Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Penyusunan APBD**

### **Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat merupakan proses dimana masyarakat yang bertindak sebagai kelompok sosial atau organisasi ataupun individu, ikut berperan dalam mengambil proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi dalam kehidupan mereka. Dalam penelitian Syamsi (2014) adapun bentuk dari partisipasi masyarakat yaitu berupa:

1. Partisipasi masyarakat berupa tenaga dalam bentuk pembangunan.
2. Partisipasi masyarakat berupa pikiran dalam bentuk kritikan.
3. Partisipasi masyarakat dalam bentuk memberikan fasilitas atau peralatandalam pelaksanaan program
4. Partisipasi masyarakat dalam bentuk memberikan kemampuan.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syamsi (2014), Fecky M., dkk (2018), Zainal A.A, Sayudi, dkk (2015), menunjukkan bahwa partisipasi

masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyusunan APBD. Namun penelitian Lestari dan Rakhmawati (2017) memberikan hasil bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap kualitas penyusunan APBD.

## **H<sub>2</sub>: Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Kualitas Penyusunan APBD**

### **Latar Belakang Pendidikan**

Pendidikan merupakan kegiatan mengembangkan dan memperbaiki SDM yang dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan. Latar belakang pendidikan merupakan ilmu yang dikuasai oleh setiap orang yang dapat ditempuh melalui jalur pendidikan formal (Sari, 2015) dan Latar belakang pendidikan dapat mempengaruhi keterlambatan dalam penetapan penyusunan APBD.

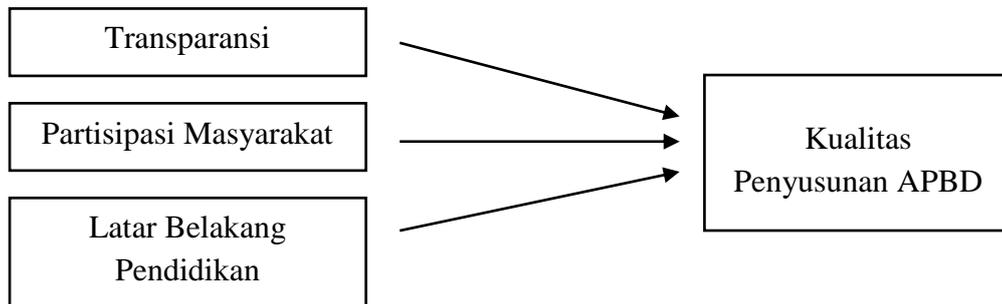
Latar belakang pendidikan ini memiliki pemahaman dan kompetensi yang dapat dimiliki setiap manusia dalam melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penetapan pegawai yang dilakukan secara tepat sesuai dengan kemampuan atau bidang pendidikan yang dimilikinya merupakan cara yang tepat untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang baik dan tepat waktu (Mutmainah dan Suryono, 2015).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Sari (2015), dan Lestari dan Rakhmawati (2017) menunjukkan latar belakang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyusunan APBD. Sedangkan (Mutmainah dan Suryono, 2015) tidak berpengaruh.

## **H<sub>3</sub>: Latar Belakang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Penyusunan APBD**

## Model Penelitian

Model penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



## METODE PENELITIAN

### Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi seluruh pihak yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sleman. Kemudian untuk sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pegawai dari pemerintah daerah yang berkaitan secara langsung dalam proses penyusunan APBD di Kabupaten Sleman.

### Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer, yang diperoleh secara langsung dari responden melalui instrument kuesioner yang di sebarakan kepada aparatur daerah atau pegawai yang berkaitan langsung dalam proses penyusunan APBD di

Kabupaten Sleman. instrument kuesioner biasanya berisikan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang memiliki keterkaitan pada variable-variabel dalam penelitian ini.

### Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel penelitian ini dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* dengan memilih sample yang akan dijadikan subjek dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel (Lestari & Rakhmawati, 2017).

Kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini hanyalah yang berkaitan secara langsung dalam penyusunan APBD di Kabupaten Sleman sehingga penyebaran kuesioner ini hanya ditujukan

untuk bagian perencanaan penganggaran dan bagian keuangan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dengan menggunakan metode survey dalam bentuk instrumen kuesioner berdasarkan masalah yang diteliti kemudian disebarkan kepada responden yaitu aparatur daerah atau pegawai yang berkaitan secara langsung dalam proses penyusunan APBD di Kabupaten Sleman. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala likert 1-5.

### **Definisi Operasional Variabel**

#### **Variabel Dependen**

Penyusunan APBD adalah proses dimana penganggaran daerah dilakukan secara konseptual yang terdiri dari perencanaan operasional anggaran serta formulasi kebijakan anggaran dan perencanaan operasional anggaran yang digunakan untuk 1 tahun anggaran. (Lestari dan Rakhmawati, 2017). Yang

termasuk dalam kategori kebijakan anggaran yaitu Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) sedangkan perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi keuangan. Menurut penelitian Laksono (2017) dalam PP No. 58 Tahun 2005 yang berisi Pedoman penyusunan APBD meliputi: Penyusunan dan penetapan rencana kerja pemerintah daerah atau yang disingkat RKPD, Kesepakatan dalam penyusunan kebijakan umum (KUA) serta prioritas dan platform anggaran sementara yang disingkat PPAS, Penyusunan Rancangan APBD, Persetujuan Rancangan APBD, Serta penetapan APBD

Dari ke lima hal-hal tersebut secara keseluruhan merupakan suatu rangkaian atau urutan siklus perencanaan anggaran yang dimulai bulan Januari hingga akhir bulan yaitu bulan Desember.

#### **Variabel Independen**

Variable independen dalam penelitian ini adalah transparansi, partisipasi masyarakat, latar belakang

pendidikan, kemudian untuk variable dependennya yaitu penyusunan APBD.

Variable independen dalam penelitian ini adalah transparansi, partisipasi masyarakat, latar belakang pendidikan, kemudian untuk variable dependennya yaitu penyusunan APBD.

### **Transparansi**

Transparansi ialah prinsip yang menjamin kebebasan, keterbukaan kepada setiap orang secara jujur dengan dasar bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengetahui informasi apapun secara terbuka dan menyeluruh terhadap pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Transparansi biasanya dibangun atas dasar informasi yang bebas sehingga mudah dimengerti dan mudah untuk dipantau.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan pemerintah dapat menggunakan media internet untuk menyebarluaskan dan menyajikan laporan keuangannya atau informasi lain yang berhubungan

dengan pemerintahan daerah (Pina dkk 2010).

### **Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat ialah proses dimana masyarakat yang bertindak sebagai kelompok sosial atau organisasi ataupun individu, ikut berperan dalam mengambil proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi dalam kehidupan mereka.

Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik berfungsi sebagai pendorong untuk mencapai terpenuhinya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dalam keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah (Astuti dan Yulianto, 2016).

### **Latar Belakang Pendidikan**

Pendidikan merupakan kegiatan mengembangkan dan memperbaiki SDM yang dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan. Latar belakang pendidikan merupakan ilmu

yang dimiliki atau dikuasai oleh setiap orang yang dapat ditempuh melalui jalur pendidikan formal dan Latar belakang pendidikan ini memiliki pemahaman dan kompetensi yang dapat dimiliki setiap manusia dalam melaksanakan suatu kegiatan tertentu (Sari, 2015).

Latar belakang pendidikan ini memiliki pemahaman dan kompetensi

yang dapat dimiliki setiap manusia dalam melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penetapan pegawai yang dilakukan secara tepat sesuai dengan kemampuan atau bidang pendidikan yang dimilikinya merupakan cara yang tepat untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang baik dan tepat waktu (Mutmainah dan Suryono, 2015).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner pada aparatur sipil negara Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Jumlah OPD yang dijadikan obyek penelitian kali ini adalah sebanyak 31 instansi yang meliputi Dinas dan Lembaga Teknis Daerah, seperti badan, kantor. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang diperoleh dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1**  
**Jumlah Sampel dan Pengembalian Kuesioner**

Keterangan	Jumlah
Total penyebaran kuesioner	120
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	9
Jumlah kuesioner yang kembali	111
Jumlah kuesioner yang tidak diisi lengkap	4
Jumlah kuesioner yang dapat diolah	107
Response rate	93%

Sumber : Hasil Analisis Data 2020

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 120 kuesioner yang disebarakan kepada responden terdapat sebanyak 111 kuesioner yang kembali. Dengan kata lain penelitian kali ini mempunyai response

rate sebesar 93% dari 111 kuesioner yang kembali tersebut, semua kuesioner yang terisi dengan baik dan dapat diolah menjadi data adalah sebanyak 107 kuesioner.

## Statistik Deskriptif

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Teoritis		Aktual		
		Kisaran	Mean	Kisaran	Mean	Std. deviation
Transparansi	107	4-20	12	12-20	15.79	1.802
Partisipasi Masyarakat	107	4-20	12	12-20	15.75	1.786
Latar Belakang Pendidikan	107	4-20	12	8-20	15.50	2.085
Penyusunan APBD	107	5-25	15	16-25	20.80	1.835

Sumber : Hasil Analisis Data 2020

Pada tabel 2 diatas memiliki nilai mean aktual nlebih besar dari mean teoritis, maka dapat disimpulkan bahwa

variabel transparansi, partisipasi masyarakat, dan latar belakang pendidikan yang ada di kabupaten sleman tinggi.

## Uji Validitas

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	Keterangan
Transparansi	0,593	Valid
Partisipasi Masyarakat	0,671	Valid
Latar Belakang Pendidikan	0.805	Valid
Penyusunan APBD	0.782	Valid

Sumber : Hasil Analisis Data 2020

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa seluruh variabel di atas memiliki nilai KMO yang lebih besar dari 0,5 sehingga seluruh butir pernyataan dapat dikatakan valid

### Uji Reliabilitas

Berdasarkan tabel 4 dibawah ini menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* Seluruh variabel memiliki nilai di atas 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan keempat variabel dalam penelitian ini memiliki nilai reliabilitas yang tinggi.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

No.	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Transparansi	0,718	<i>Reliable</i>
2	Partisipasi Masyarakat	0,667	<i>Reliable</i>
3	Latar Belakang Pendidikan	0,853	<i>Reliable</i>
4	Penyusunan APBD	0,772	<i>Reliable</i>

Sumber : Hasil Analisis Data 2020

### Uji Normalitas

**Tabel 5**  
**Hasil Uj Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		107
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,17282926
Most Extreme Differences	Absolute	,126
	Positive	,126
	Negative	-,102
Kolmogorov-Smirnov Z		1,304
Asymp. Sig. (2-tailed)		,067

Sumber : Hasil Analisis Data 2020

Berdasarkan tabel 5 diatas uji *kolomogorov-smirnov* dengan nilai signifikansi sebesar  $0,067 > \alpha 0,05$

sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini dikatakan berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Berdasarkan tabel 6 dibawah ini dapat diketahui bahwa seluruh variabel independen model regresi memiliki nilai

*tolerance*  $> 0.1$  dan *VIF*  $< 10$ . Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel tidak terkena multikolinearitas.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Collinierity Statistic		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
Transparansi	0,662	1,510	Tidak terjadi Multikolinearitas
Partisipasi Masyarakat	0,641	1,559	Tidak terjadi Multikolinearitas
Latar Belakang Pendidikan	0,810	1,234	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber : Hasil Analisis Data 2020

### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Nilai Sig	Keterangan
Transparansi	0,352	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Partisipasi Masyarakat	0,228	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Latar Belakang Pendidikan	0,053	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber : Hasil Analisis Data 2020

Berdasarkan tabel 7 nilai sig pada variabel transparansi yaitu sebesar 0,352, variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,228 dan variabel latar belakang pendidikan sebesar 0,053. Untuk itu,

seluruh variabel independen pada penelitian ini dinyatakan tidak terkena heteroskedastisitas karena seluruh variabel memiliki nilai sig > 0.05.

## Uji Hipotesis dan Analisis Data

**Tabel 8**  
**Hasil Perhitungan Regresi**

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11,728	1,652		7,098	,000
Transparansi	,345	,106	,339	3,242	,002
Partisipasi Masyarakat	-,008	,109	-,008	-,071	,944
Latar Belakang Pendidikan	,242	,083	,275	2,907	,004
Adjusted R Square	0,232				
F	11,692				
Sig F	0,000(a)				

Sumber : Hasil Analisis Data 2020

Dari tabel 8 diatas menunjukkan bahwa hasil regresi berganda pada penelitian ini adalah: **Penyusunan APBD = 11,728 + 0,345T - 0,008PM + 0.242LBP + e.**

Hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

### Hasil Uji Hipotesis 1 (H<sub>1</sub>)

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel transparansi memiliki nilai sig (0.002) < α (0.05) dengan nilai koefisien positif sebesar 0.345. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kualitas penyusunan APBD, sehingga **H<sub>1</sub> diterima**.

### **Hasil Uji Hipotesis 2 (H<sub>2</sub>)**

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel partisipasi masyarakat memiliki nilai sig (0.944) >  $\alpha$  (0.05) dengan nilai koefisien negatif sebesar 0.008. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi masyarakat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas penyusunan APBD, sehingga **H<sub>2</sub> ditolak**.

### **Hasil Uji Hipotesisi 3 (H<sub>3</sub>)**

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel latar belakang pendidikan memiliki nilai sig (0.004) <  $\alpha$  (0.05) dengan nilai koefisien positif sebesar 0.242. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel latar belakang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyusunan APBD, sehingga **H<sub>3</sub> diterima**.

### **Uji Koefisien Determinasi (Adj R<sup>2</sup>)**

Uji koefisien determinasi (Adj R<sup>2</sup>) dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan tabel diatas penelitian ini memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 0,232 yang berarti bahwa variabel transparansi, partisipasi masyarakat, dan latar belakang pendidikan dapat menjelaskan variabel penyusunan APBD sebesar 23,2%, sedangkan 76,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

### **Uji Koefisien Simultan (Uji F)**

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Syarat bahwa variabel independen mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen apabila nilai sig < 0.05.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai sig 0.000 < 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel

transparansi, partisipasi masyarakat, dan latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel penyusunan APBD.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Penyusunan APBD.**

Hasil dari pengujian hipotesis pertama ( $H_1$ ) pada penelitian ini menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyusunan APBD sehingga  $H_1$  diterima. penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Rakhmawati (2017) yang juga menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyusunan APBD karena dengan dokumen anggaran yang mudah diakses dan mudah dimengerti maka semakin baik kualitas dalam penyusunan APBD.

Hal ini selaras dengan teori *stewardship* dimana teori ini didesain

untuk menguji petinggi dalam organisasi sebagai pelayan yang dapat bertindak secara baik kepada principalnya. Dalam sektor publik pelaku steward yaitu kepala daerah, sedangkan pelaku principal yaitu masyarakat. Sehingga dapat dijelaskan bahwa transparansi dapat menjamin kebebasan atau keterbukaan kepada setiap orang yang memiliki hak untuk mendapatkan akses informasi secara terbuka dan menyeluruh atas pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya prinsip keterbukaan dari pemerintah daerah masyarakat dapat memperoleh informasi apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut baik yang berhubungan dengan aktivitas dalam mengelola sumberdaya publik atau dalam hal yang berkaitan dengan pemerintahan daerah baik berupa penyajian laporan keuangan ataupun informasi lainnya yang diperlukan oleh principal demi tercapainya kepuasan bagi pengguna informasi (principal) tersebut.

Seluruh informasi yang dimiliki oleh pemerintah merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian masyarakat hal ini disebabkan oleh adanya keterkaitan dalam transparansi, masalah etika, korupsi, penyimpangan administrasi, dan akuntabilitas (Piotrowski dan Bartelli 2010). Untuk meningkatkan kepuasan bagi pengguna informasi, pemerintah dapat menggunakan media internet untuk menyebarluaskan dan menyajikan laporan keuangannya atau informasi lain yang berhubungan dengan pemerintahan daerah baik itu transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan (Pina dkk 2010).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zaini dan Ningsih (2018), Panggabean, Dame, (2018) dan Fecky M, dkk (2018) yang juga menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyusunan APBD.

## **Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Penyusunan APBD.**

Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana anggaran daerah sangat penting karena dengan adanya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan akan membantu anggota dewan legislatif dalam penyusunan anggaran daerah, karena masyarakatlah yang mengetahui berapa banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh karena itu partisipasi masyarakat diperlukan dalam penyusunan anggaran. Menurut Griesgraber dan Gunter (1996) dalam (Mutiar dkk 2019) partisipasi yang melibatkan masyarakat dapat diartikan sebagai mekanisme untuk mengelola rencana atau program mulai dari tahap identifikasi hingga tahap implementasi.

Tetapi, berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis kedua (H<sub>2</sub>) penelitian ini menyatakan bahwa variabel partisipasi masyarakat tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap kualitas penyusunan APBD, sehingga H<sub>2</sub> ditolak.

Dalam teori *stewardship* dimana pelaku steward yaitu kepala daerah dan pelaku principal yaitu masyarakat yang dalam artian dapat diwakilkan oleh DPRD, pada kenyataannya masyarakat saat ini hanya bersifat pasif dan tidak terlalu berpartisipasi secara aktif serta tidak terlibat secara langsung dalam menyampaikan aspirasinya melalui anggota DPRD baik dalam proses penyelenggaraan pemerintah yang khususnya pada saat penyusunan anggaran APBD karena masyarakat telah mempercayakan sepenuhnya kepada DPRD Daerah yang dalam artian dapat mewakili masyarakat, sehingga masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam penyusunan APBD. Meskipun tidak adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD maka pemerintah daerah pun tetap melaksanakan penyusunan APBD meskipun partisipasi masyarakat

diwakilkan oleh DPRD bukan secara langsung oleh masyarakat.

Menurut (Adisasmita, 2013) partisipasi masyarakat yang berkurang itu mungkin disebabkan oleh proses peningkatan partisipasi masyarakat yang belum dipahami oleh semua pihak yang ikut terlibat dalam proses penyusunan APBD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Rakhmawati (2017) yang memberikan hasil bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap kualitas penyusunan APBD karena dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD tidak mempengaruhi dalam kualitas APBD yang berarti bahwa ada atau tidaknya partisipasi masyarakat tidak mempengaruhi dalam proses penyusunan APBD.

## **Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Kualitas Penyusunan APBD.**

Hasil dari pengujian hipotesis ketiga (H<sub>3</sub>) pada penelitian ini menyatakan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyusunan APBD sehingga H<sub>3</sub> diterima.

Hal ini selaras dengan teori *stewardship* sehingga dapat dijelaskan bahwa latar belakang pendidikan memiliki pengaruh dalam penetapan penyusunan APBD karena dengan latar belakang pendidikan yang sesuai maka kecil kemungkinan terjadinya keterlambatan dalam penyusunan APBD. Tetapi, sebaliknya jika latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan kegiatan penganggaran penyusunan APBD maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya keterlambatan dalam penyusunan APBD atau penetapan APBD. Sehingga penetapan pegawai yang dilakukan secara tepat sesuai dengan kemampuan atau bidang

pendidikan yang dimilikinya merupakan cara yang tepat untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang baik dan tepat waktu, jadi semakin cepat penyusunan APBD itu disusun maka semakin cepat pula dana anggaran akan didistribusikan di desa-desa tersebut.

Hal ini sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) dan Lestari dan Rakhmawati (2017) yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas penyusunan APBD. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mutmainah dan Suryono, (2015) yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap kualitas penyusunan APBD.

## **SIMPULAN, SARAN, DAN**

### **KETERBATASAN PENELITIAN**

#### **Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh transparansi, partisipasi masyarakat, latar

belakang pendidikan terhadap penyusunan APBD. Penelitian ini dilaksanakan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Kabupaten Sleman. Pada penelitian ini Jumlah OPD yang dijadikan obyek penelitian kali ini adalah sebanyak 31 instansi yang meliputi Dinas dan Lembaga Teknis Daerah, seperti badan, kantor, tidak termasuk kecamatan, UPT dan desa. Berdasarkan data yang diperoleh maupun hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Penyusunan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sleman karena dengan dokumen anggaran yang mudah diakses serta mudah dimengerti maka semakin baik kualitas dalam penyusunan APBD dan para pengguna (principal) menjadi lebih mudah dalam mengakses informasi yang di perlukan.

2. Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas penyusunan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sleman karena masyarakat saat ini hanya bersifat pasif dan tidak terlalu berpartisipasi secara aktif baik dalam proses penyelenggaraan pemerintah yang khususnya pada saat penyusunan anggaran APBD karena masyarakat telah mempercayakan sepenuhnya kepada DPRD Daerah yang dalam artian dapat mewakili masyarakat, sehingga masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam penyusunan APBD.

3. Latar Belakang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Penyusunan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sleman karena penetapan pegawai yang dilakukan secara tepat sesuai dengan kemampuan atau bidang pendidikan

yang dimilikinya merupakan cara yang tepat untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang baik dan tepat waktu dan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai maka kecil kemungkinannya terjadinya keterlambatan dalam penyusunan APBD begitupula sebaliknya.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, antara lain :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, tidak hanya terbatas pada satu Kabupaten melainkan lebih dari satu kabupaten/kota atau penelitian pada lingkup satu provinsi agar bisa membandingkan hasilnya antar kabupaten.
2. Penelitian selanjutnya dapat memperluas model penelitian dengan memperbanyak faktor-faktor lain

yang dapat mempengaruhi penyusunan APBD. Variabel diluar penelitian ini yang disarankan untuk melakukan penelitian selanjutnya adalah variabel hubungan eksekutif dan legislative.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan teknik pengambilan data dengan metode wawancara agar dapat meningkatkan keseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan.
4. Peneliti selanjutnya dapat memperhatikan dan memperbaiki setiap butir pernyataan yang terdapat pada kuesioner agar menghasilkan data yang valid dan reliable.

### **Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan menggunakan kuesioner sehingga kemungkinan responden belum mengekspresikan sepenuhnya pendapat tentang Penyusunan APBD. Selain dengan

metode survey peneliti selanjutnya juga dapat dilakukan dengan metode wawancara.

2. Tempat pengambilan sampel hanya dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, sehingga penelitian ini hanya menggambarkan keadaan di Kabupaten Sleman saja.
3. Penelitian ini menggunakan sampel di Kabupaten Sleman dengan jumlah responden sebanyak 107 responden di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga perlu kehati-hatian di dalam menggeneralisasikan hasil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, Vol. 3 No. 1, 2018, pp. 123-138.
- Adisasmata, R. (2013). Pembangunan perdesaan pendekatan partisipatif, tipologi, strategi, konsep desa pusat pertumbuhan.
- Astuti, T. P., & Yulianto. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1-14.
- Coryanata, I. (2012, Juli). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 12 No. 2.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991, June). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Government and Shareholder. *Australia Journal Of Management*, 16(1), 49-64.
- Fecky M., P., Rotinsulu, D. C., & Engka, D. S. (2018). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Penyusunan Apbdesa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol.19 No.7.
- Ghozali, I. (2011). *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan PLS*. Semarang: BPUD.
- Griesgraber, J., & B.G, Gunter. (1996). Development: new paradigms and principles for the twenty-first century. East Haven: CT Pluto Press
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Volume 2, Nomor 1, Hal.: 53-64.
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. (2018, Oktober). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(1)(2337-4314), 29-41.
- Kirana P, L. L. (2003). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance.

- Laksono, F. (2017). Dimensi Manajerial dan Politik Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Ketepatan Waktu Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2013 -. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, Vol. 3, No. 1, pp 28-35.
- Lestari, D. S., & Rakhmawati, A. (2017, September). Faktor-Faktor YANG Mempengaruhi Proses Penyusunan APBD Dan Dampaknya Terhadap Kualitas APBD. *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, Vol. IX. No. 3.
- Murtin, A. (2015, September). Optimalisasi Peran Analisa Standar Belanja Dalam Penyusunan Anggaran Belanja SKPD Di Kabupaten Lingga. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 15(2)(1693-7597), 156-171.
- Mutiara, N., Mursinto, D., & Maliki, Z. (2019, June). Community Participation in Village Development from Islamic Economic Perspectives. *Journal of Innovation in Business and Economics*, Vol. 03 No. 01 June 2019 (E-ISSN: 2581-2025 ), Page 23-32 .
- Mutmainah, K., & Suryono, N. A. (2015, Juli). Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan Dalam Penyusunan APBD ( Studi Kasus Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2009-2012 ). *Volume 10 No. 2*,(ISSN: 1907–426X), 1-20.
- Nazaruddin, I., & Basuki, A. T. (2015). *Analisis Statistika Dengan SPSS*. Yogyakarta: Danisa Media.
- Panggabean, F. Y., & Dame, I. (2018, Agustus). Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Daerah, Transparansi Publik Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Di Kantor Kecamatan Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, Vol. 9 No.1 (ISSN: 2087 - 4669 ).
- Pina, V., Torres, I., & Royo, S. (2010). Is e-government promoting converge towards more accountable local government. *International Public Management Journal*, Vol. 13 No. 4, , pp. 350-380. .
- Sari, E. (2015). Pengaruh hubungan eksekutif dan legislatif, latar belakang pendidikan, divided government dan dana alokasi umum terhadap keterlambatan penetapan APBD di kabupaten limapuluh kota. *Jon FEKON*, Vol. 2 No. 2.
- Syamsi , S. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 3, No. 1 .
- Zainal A.A, A., Sayudi, A., & Sarwani. (2015). Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang anggaran dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penyusunan APBD. *JSAI*, Vol. 2 No. 1, 37-49.
- Zaini, A., & Ningsih, E. S. (2018). Analisis Proses Penyusunan Dan Pelaksanaan Apbdesa (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa) Secara Akuntabel, Transparan Dan Partisipatif (Studi Pada Beberapa Desa Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 3, No. 3(E-ISSN 2581-1002).
- Zimmerman, J. (1977). The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives. *Journal of Accounting Research*, Vol. 15, pp. 107-144.